

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
  31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
  32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 1);
  33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
  34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);
  35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- |                                |   |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah           | : | Rp. 1.956.090.185.104,35        |
| b. Belanja Daerah dan Transfer | : | <u>Rp. 2.103.467.535.397,26</u> |
| Defisit                        | : | (Rp. 147.377.350.292,91)        |
| c. Pembiayaan Daerah           | : |                                 |
| Penerimaan Pembiayaan          | : | Rp. 742.764.421.538,17          |

Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 27.500.000.000,00

Surplus : Rp. 715.264.421.538,17

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 42.845.720.861,02) (minus empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan : Rp. 1.998.935.905.965,37  
setelah perubahan

Realisasi Pendapatan : Rp. 1.956.090.185.104,35

Selisih Kurang : (Rp. 42.845.720.861,02)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp. 604.395.128.229,28) (minus enam ratus empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja dan : Rp. 2.707.862.663.626,54  
Transfer setelah perubahan

Realisasi Belanja dan : Rp. 2.103.467.535.397,26  
Transfer

Selisih Kurang : (Rp. 604.395.128.229,28)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 561.549.407.368,26 (lima ratus enam puluh satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Surplus/Defisit : (Rp. 708.926.757.661,17)  
setelah perubahan

Realisasi Surplus/Defisit : (Rp. 147.377.350.292,91)



- Selisih Lebih : Rp. 561.549.407.368,26
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Penerimaan : Rp. 742.764.421.538,17  
Pembiayaan setelah perubahan
- Realisasi Penerimaan : Rp. 742.764.421.538,17  
Pembiayaan
- Selisih Kurang : Rp. 0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp. 6.337.663.877,00) (minus enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Pengeluaran : Rp. 33.837.663.877,00  
Pembiayaan setelah perubahan
- Realisasi Pengeluaran : Rp. 27.500.000.000,00  
Pembiayaan
- Selisih Kurang :(Rp. 6.337.663.877,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 6.337.663.877,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Pembiayaan : Rp. 708.926.757.661,17  
Netto setelah perubahan
- Realisasi Pembiayaan : Rp. 715.264.421.538,17  
Pembiayaan Netto
- Selisih Lebih : Rp. 6.337.663.877,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 567.887.071.245,26 (lima ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah dua puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp.	742.764.421.538,17
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	: (Rp. <u>742.764.421.538,17</u> )	
Sub Total	: Rp.	0,00
c. Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	: Rp. <u>567.887.071.245,26</u>	
Sub Total	: Rp.	567.887.071.245,26
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	: Rp.	0,00
e. Lain-lain	: Rp. <u>0,00</u>	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp.	567.887.071.245,26

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	: Rp.	6.498.491.837.328,99
b. Jumlah Kewajiban	: Rp.	12.963.093.499,59
c. Jumlah Ekuitas	: Rp.	6.485.528.743.829,40

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sejumlah (Rp. 33.344.292.499,42) (minus tiga puluh tiga

milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Laporan Operasional	: Rp.	1.966.951.373.321,51
b.	Beban Operasional	: <u>Rp.</u>	<u>1.985.157.309.799,93</u>
	Surplus/Defisit Operasional	: (Rp.	18.205.936.478,42)
c.	Surplus/Defisit Non Operasional	: (Rp.	14.943.235.303,00)
d.	Beban Luar Biasa	: <u>Rp.</u>	<u>195.120.718,00</u>
	Surplus/Defisit Laporan Operasional	: (Rp.	33.344.292.499,42)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 571.634.476.072,83 (lima ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Arus kas dari aktivitas Operasi	: Rp.	219.597.279.174,41
	Arus kas dari aktivitas Investasi Non Keuangan	: (Rp.	390.727.224.639,75)
	Arus kas dari aktivitas Pendanaan	: Rp.	0,00
	Arus kas dari aktivitas Transitoris	: <u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Kenaikan Kas	: (Rp.	171.129.945.465,34)
b.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas JKN, Kas BOSNAS, dan Kas BLUD SILPA	: Rp.	742.764.421.538,17
c.	Saldo Akhir Kas di BUD	: Rp.	552.257.089.862,88
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp.	0,00

Saldo Akhir Kas di	: Rp.	0,00
Bendahara Penerimaan		
JKN SILPA 2020		
Saldo Akhir Kas di	: Rp.	0,00
Bendahara Dana		
BOSNAS SILPA 2020		
Saldo Akhir Kas di	: Rp.	10.961.839.481,97
Bendahara BLUD		
SILPA 2020		
Saldo Akhir Kas Lainnya	: Rp.	8.415.546.727,98
Saldo Akhir Kas di	: Rp.	0,00
Bendahara Penerimaan		
JKN non SILPA		
Saldo Akhir Kas di	: Rp.	<u>0,00</u>
Bendahara Dana		
BOSNAS non SILPA		
Saldo Akhir Kas	: Rp.	571.634.476.072,83

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sejumlah Rp.6.485.528.743.829,40 (enam trilyun empat ratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	: Rp.	6.379.676.358.783,95
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	: (Rp.	33.344.292.499,42)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	: Rp.	<u>139.196.677.544,87</u>
Ekuitas Akhir	: Rp.	6.485.528.743.829,40

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 4 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal 4 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 101-2/2021

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 Periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(dalam Rupiah)	
			Bertambah / Berkurang Rp.	%
1	2	3	4 = 2-3	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	425.000.000.000,00	351.759.920.903,49	(73.240.079.096,51)	82,77
Pendapatan Retribusi Daerah	35.731.137.058,00	38.449.140.906,00	2.718.003.848,00	107,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.242.674.511,00	33.348.652.404,80	5.105.977.893,80	118,08
Lain-lain PAD yang Sah	43.397.605.834,28	67.631.529.741,06	24.233.923.906,78	155,84
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	532.371.417.403,28	491.189.243.955,35	(41.182.173.447,93)	92,26
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	57.321.006.000,00	59.204.393.562,00	1.883.387.562,00	103,29
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	49.822.599.000,00	73.023.421.955,00	23.200.822.955,00	146,57
Dana Alokasi Umum	810.812.876.000,00	805.071.632.000,00	(5.741.244.000,00)	99,29
Dana Alokasi khusus	167.542.230.052,00	161.164.220.911,00	(6.378.009.141,00)	96,19
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.085.498.711.052,00	1.098.463.668.428,00	12.964.957.376,00	101,19
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Penyesuaian	62.767.752.000,00	73.440.909.000,00	10.673.157.000,00	117,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	62.767.752.000,00	73.440.909.000,00	10.673.157.000,00	117,00



Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(dalam Rupiah)	
			Bertambah / Berkurang Rp.	%
1	2	3	4 = 2-3	5
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	-
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.707.862.663.626,54	2.103.467.535.397,26	604.395.128.229,28	77,68
SURPLUS/ (DEFISIT)	(708.926.757.661,17)	(147.377.350.292,91)	(561.549.407.368,26)	20,79
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
Jumlah Penerimaan	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Pengeluaran	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
PEMBIAYAAN NETTO	708.926.757.661,17	715.264.421.538,17	(6.337.663.877,00)	100,89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	567.887.071.245,26	(567.887.071.245,26)	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I.1  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Belanja Subsidi	Realisasi (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
	23	24	25	26	27	28 (18+s.d+27)	Rp		%
							29=28-17	30	
-	-	-	-	-	-	1.494.301.659.959,26	335.652.990.505,12	18,34	30
-	-	-	-	-	-	494.048.633.181,89	135.662.512.776,70	21,54	
-	-	-	-	-	-	473.429.402.085,09	134.952.839.873,50	22,18	
-	-	-	-	-	-	723.934.000,00	17.426.000,00	2,35	
-	-	-	-	-	-	1.079.451.879,80	28.918.120,20	2,61	
-	-	-	-	-	-	851.281.800,00	10.993.200,00	1,27	
-	-	-	-	-	-	865.098.500,00	581.500,00	0,07	
-	-	-	-	-	-	926.244.356,00	21.620.644,00	2,28	
-	-	-	-	-	-	760.746.650,00	37.228.350,00	4,67	
-	-	-	-	-	-	801.505.320,00	14.667.180,00	1,80	
-	-	-	-	-	-	771.261.100,00	29.953.900,00	3,74	
-	-	-	-	-	-	749.977.848,00	56.367.152,00	6,99	
-	-	-	-	-	-	878.800.525,00	57.484.475,00	6,14	
-	-	-	-	-	-	755.898.350,00	34.666.650,00	4,39	
-	-	-	-	-	-	673.272.750,00	16.022.250,00	2,32	
-	-	-	-	-	-	829.228.650,00	4.991.350,00	0,60	
-	-	-	-	-	-	819.612.874,00	19.462.126,00	2,32	
-	-	-	-	-	-	772.951.159,00	59.126.341,00	7,11	
-	-	-	-	-	-	806.929.000,00	2.501.000,00	0,31	
-	-	-	-	-	-	826.435.500,00	4.969.500,00	0,60	
-	-	-	-	-	-	759.219.423,00	22.920.577,00	2,93	
-	-	-	-	-	-	841.916.300,00	28.983.700,00	3,33	
-	-	-	-	-	-	867.265.196,00	68.780.804,00	7,35	
-	-	-	-	-	-	802.742.000,00	8.596.000,00	1,06	
-	-	-	-	-	-	581.104.200,00	46.478.300,00	7,41	
-	-	-	-	-	-	679.662.340,00	31.265.160,00	4,40	
-	-	-	-	-	-	696.309.930,00	43.400.070,00	5,87	
-	-	-	-	-	-	608.093.279,00	24.486.721,00	3,87	
-	-	-	-	-	-	459.762.100,00	512.900,00	0,11	
-	-	-	-	-	-	430.526.067,00	17.268.933,00	3,86	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan																	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realisasi (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%	%										
		Penerimaan 3	Pengeluaran 4	Penerimaan 5	Pengeluaran 6	Penerimaan 7	Pengeluaran 9												
1	2																		
3	Urusan Penujng Pemerintah	742.764.421.538,17	33.837.663.877,00	742.764.421.538,17	27.500.000.000,00	0,00	0,00	6.337.663.877,00	18,73										
3.02	Keuangan	742.764.421.538,17	33.837.663.877,00	742.764.421.538,17	27.500.000.000,00	0,00	0,00	6.337.663.877,00	18,73										
3.02.0101	Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku PPKD	742.764.421.538,17	33.837.663.877,00	742.764.421.538,17	27.500.000.000,00	0,00	0,00	6.337.663.877,00	18,73										

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Realisasi	Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	3		(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	
00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.998.935.905.965,37	1.956.090.185.104,35	42.845.720.861,02	97,86		
00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	532.371.417.403,28	491.189.243.955,35	41.182.173.447,93	92,26		
00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	425.000.000.000,00	351.759.920.903,49	73.240.079.096,51	82,77		
00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	35.731.137.058,00	38.449.140.906,00	(2.718.003.848,00)	107,61		
00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.242.674.511,00	33.348.652.404,80	(5.105.977.893,80)	118,08		
00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.397.605.834,28	67.631.529.741,06	(24.233.923.906,78)	155,84		
00 00 4 2	Dana Perimbangan	1.085.498.711.052,00	1.098.463.668.428,00	(12.964.957.376,00)	101,19		
00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	107.143.605.000,00	132.227.815.517,00	(25.084.210.517,00)	123,41		
00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	810.812.876.000,00	805.071.632.000,00	5.741.244.000,00	99,29		
00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	167.542.230.052,00	161.164.220.911,00	6.378.009.141,00	96,19		
00 00 4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	381.065.777.510,09	366.437.272.721,00	14.628.504.789,09	96,16		
00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	102.414.900.000,00	90.756.375.316,00	11.658.524.684,00	88,62		
00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182.924.766.510,09	169.329.629.405,00	13.595.137.105,09	92,57		
00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.767.752.000,00	73.440.909.000,00	(10.673.157.000,00)	117,00		
00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	32.958.359.000,00	32.910.359.000,00	48.000.000,00	99,85		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.998.935.905.965,37</b>	<b>1.956.090.185.104,35</b>	<b>42.845.720.861,02</b>	<b>97,86</b>		
00 00 5	BELANJA	2.707.862.663.626,54	2.103.467.535.397,26	604.395.128.229,28	77,68		
00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.324.347.929.558,25	890.082.252.087,77	434.265.677.470,48	67,21		
00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	995.791.702.032,09	729.276.551.486,77	266.515.150.545,32	73,24		
00 00 5 1 4	BELANJA HIBAH	115.696.724.000,00	98.172.201.249,00	17.524.522.751,00	84,85		
00 00 5 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12.819.760.000,00	8.018.690.000,00	4.801.070.000,00	62,55		
00 00 5 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	200.039.743.526,16	54.614.809.352,00	145.424.934.174,16	27,30		
00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.383.514.734.068,29	1.213.385.283.309,49	170.129.450.758,80	87,70		
00 00 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	107,00	(107,00)	0,00		
07 XX 5 2	Program Pelayanan Kesejahteraan	140.448.645.032,40	116.004.594.508,48	24.444.050.523,92	82,60		


Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	776.602.085.415,17	770.264.421.538,17	6.337.663.877,00	99,18
00 00 6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	0,00	100,00
00 00 6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	6.337.663.877,00	81,27
	PEMBIAYAAN NETTO	708.926.757.661,17	715.264.421.538,17	(6.337.663.877,00)	100,89

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,**  
**ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	Urusan Wajib	839.953.543.186,99	592.769.949.731,44	397.231.157.545,95	1.829.954.650.464,38	617.903.302.788,27	531.864.959.162,24	344.533.398.008,75	1.494.301.659.959,26	(335.652.990.505,12)	81,66
1 01	Pendidikan	488.012.083.430,09	96.407.459.917,50	45.291.602.611,00	629.711.145.958,59	358.338.446.268,00	91.866.906.364,89	43.843.280.549,00	494.048.633.181,89	(135.662.512.776,70)	78,46
1 01 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.478.548.430,09	91.505.024.467,50	44.398.669.061,00	608.382.241.958,59	342.940.131.268,00	87.447.398.798,09	43.041.872.019,00	473.429.402.085,09	(134.952.839.873,50)	77,82
1 01 01	Belanja Tidak Langsung	429.683.562.950,09	0,00	0,00	429.683.562.950,09	306.445.445.268,00	107,00	0,00	306.445.445.375,00	(123.238.117.575,09)	71,32
1 01 01	Belanja Tidak Langsung	429.683.562.950,09	0,00	0,00	429.683.562.950,09	306.445.445.268,00	107,00	0,00	306.445.445.375,00	(123.238.117.575,09)	71,32
1 01 01 07	Program Pelayanan Kesekretariatan	444.494.580,00	9.873.323.463,00	1.467.141.950,00	11.784.959.993,00	398.060.000,00	7.292.464.987,00	1.305.564.800,00	8.996.089.787,00	(2.788.870.206,00)	76,34
1 01 01 07 00 1	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	1.880.000,00	121.360.000,00	0,00	123.240.000,00	0,00	35.280.000,00	0,00	35.280.000,00	(87.960.000,00)	28,63
1 01 01 07 00 2	Penatausahaan barang milik daerah	15.400.000,00	212.545.000,00	0,00	227.945.000,00	14.000.000,00	179.422.100,00	0,00	193.422.100,00	(34.522.900,00)	84,85
1 01 01 07 00 3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0,00	21.368.000,00	0,00	21.368.000,00	0,00	21.347.500,00	0,00	21.347.500,00	(20.500,00)	99,90
1 01 01 07 00 4	Penyusunan laporan keuangan	95.670.000,00	90.030.000,00	0,00	185.700.000,00	92.890.000,00	86.110.675,00	0,00	179.000.675,00	(6.699.325,00)	96,39
1 01 01 07 00 5	Penyusunan bahan Anjab/ABK	500.000,00	34.500.000,00	0,00	35.000.000,00	500.000,00	34.500.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	100,00
1 01 01 07 00 6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	0,00	8.562.500,00	0,00	8.562.500,00	0,00	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	(2.500,00)	99,97
1 01 01 07 00 8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	0,00	17.375.000,00	0,00	17.375.000,00	(875.000,00)	95,21
1 01 01 07 01 0	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	0,00	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00	0,00	26.216.500,00	0,00	26.216.500,00	(983.500,00)	96,38

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4 06 05 16 51 11 9	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bakalankrajan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
4 06 05 16 57 11 6	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bakalankrajan	248.500.000,00	0,00	0,00	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	248.500.000,00	0,00	100,00
4 06 05 16 63 11 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalankrajan ( DAU Tambahan )	550.000,00	13.750.000,00	0,00	14.300.000,00	250.000,00	13.597.000,00	0,00	13.847.000,00	(453.000,00)	96,83
4 06 05 17 11	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	7.900.000,00	652.000.000,00	0,00	659.900.000,00	2.730.000,00	652.000.000,00	0,00	654.730.000,00	(5.170.000,00)	99,22
4 06 05 17 05 11 9	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	5.200.000,00	303.000.000,00	0,00	308.200.000,00	2.730.000,00	303.000.000,00	0,00	305.730.000,00	(2.470.000,00)	99,20
4 06 05 17 11 11 6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalankrajan (DAU Tambahan)	2.700.000,00	349.000.000,00	0,00	351.700.000,00	0,00	349.000.000,00	0,00	349.000.000,00	(2.700.000,00)	99,23
4 06 05 22 11	Program Pemerintahan Umum	388.340.000,00	224.903.900,00	56.560.100,00	669.804.000,00	387.940.000,00	218.424.064,00	55.767.050,00	662.131.114,00	(7.672.886,00)	98,85
4 06 05 22 05 11 9	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 06 05 22 11 11 5	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bakalankrajan	344.400.000,00	0,00	0,00	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00	0,00	344.400.000,00	0,00	100,00
4 06 05 22 17 11 2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	43.940.000,00	224.903.900,00	56.560.100,00	325.404.000,00	43.540.000,00	218.424.064,00	55.767.050,00	317.731.114,00	(7.672.886,00)	97,64
	Jumlah	1.170.472.917.904,49	788.951.030.139,94	419.882.488.055,95	2.379.306.436.100,38	890.953.226.948,77	688.481.383.207,74	363.227.224.639,75	1.942.661.834.796,26	(436.644.601.304,12)	81,65

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH. M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I.4  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA  
 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
01	Pelayanan Umum	896.037.979.601,16	624.708.580.310,77	271.329.399.290,39	69,72
01 1 07	Tenaga Kerja	12.914.723.057,00	10.464.536.960,77	2.450.186.096,23	81,03
01 1 16	Komunikasi dan Informatika	21.863.379.724,00	19.821.827.096,00	2.041.552.628,00	90,66
01 1 24	Kearsipan	396.121.400,00	393.600.562,00	2.520.838,00	99,36
01 3 01	Perencanaan	13.448.938.933,00	11.855.333.108,00	1.593.605.825,00	88,15
01 3 02	Keuangan	442.573.957.305,76	238.238.054.563,00	204.335.902.742,76	53,83
01 3 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	12.924.027.756,00	10.369.852.488,00	2.554.175.268,00	80,24
01 3 04	Penelitian dan Pengembangan	1.794.260.000,00	1.749.125.720,00	45.134.280,00	97,48
01 4 01	Fungsi Sekretariat Daerah	67.474.172.386,00	54.305.330.223,00	13.168.842.163,00	80,48
01 4 02	Pengawasan	12.665.873.689,40	10.873.408.339,50	1.792.465.349,90	85,85
01 4 03	Pendukung Fungsi DPRD	98.678.293.867,00	67.261.995.370,00	31.416.298.497,00	68,16
01 4 06	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	211.304.231.483,00	199.375.515.880,50	11.928.715.602,50	94,35
02	Pertahanan	441.767.040,00	440.440.040,00	1.327.000,00	99,70
02 1 21	Persandian	441.767.040,00	440.440.040,00	1.327.000,00	99,70
03	Ketertiban dan ketentraman	33.115.832.115,00	28.966.971.777,00	4.148.860.338,00	87,47
03 1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.533.374.342,00	21.402.272.412,00	3.131.101.930,00	87,24
03 4 04	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	8.582.457.773,00	7.564.699.365,00	1.017.758.408,00	88,14
04	Ekonomi	71.595.071.757,05	64.047.208.048,94	7.547.863.708,11	89,46
04 1 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36.757.103.431,00	31.900.025.989,94	4.857.077.441,06	86,79
04 1 18	Penanaman Modal	2.927.664.800,00	2.847.496.800,00	80.168.000,00	97,26
04 1 20	Statistik	714.552.946,00	690.308.695,00	24.244.251,00	96,61
04 2 01	Kelautan dan Perikanan	1.336.044.000,00	909.799.500,00	426.244.500,00	68,10
04 2 03	Pertanian	633.754.800,00	620.196.350,00	13.558.450,00	97,86
04 2 06	Perdagangan	24.978.465.780,05	23.424.426.898,00	1.554.038.882,05	93,78
04 2 07	Perindustrian	4.247.486.000,00	3.654.953.816,00	592.532.184,00	86,05



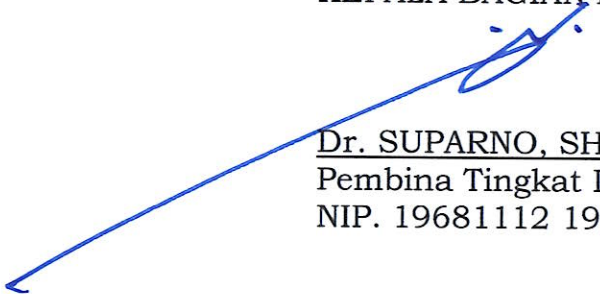
KODE	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
05	Lingkungan hidup	152.240.517.377,90	139.559.643.063,54	12.680.874.314,36	91,67
05 1 11	Lingkungan hidup	119.226.456.511,00	110.434.314.768,54	8.792.141.742,46	92,63
05 1 15	Perhubungan	33.014.060.866,90	29.125.328.295,00	3.888.732.571,90	88,22
06	Perumahan dan fasilitas umum	417.002.308.034,94	365.609.592.218,00	51.392.715.816,94	87,68
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	402.373.673.427,94	352.060.848.463,00	50.312.824.964,94	87,50
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.628.634.607,00	13.548.743.755,00	1.079.890.852,00	92,62
07	Kesehatan	400.820.371.719,90	299.939.012.267,95	100.881.359.451,95	74,83
07 1 02	Kesehatan	396.659.415.919,90	297.046.854.308,95	99.612.561.610,95	74,89
07 1 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.160.955.800,00	2.892.157.959,00	1.268.797.841,00	69,51
08	Pariwisata dan budaya	9.492.252.534,00	5.228.567.664,83	4.263.684.869,17	55,08
08 1 22	Kebudayaan	3.977.990.000,00	3.592.474.350,00	385.515.650,00	90,31
08 2 02	Pariwisata	5.514.262.534,00	1.636.093.314,83	3.878.169.219,17	29,67
10	Pendidikan	654.943.370.642,59	516.662.147.230,33	138.281.223.412,26	78,89
10 1 01	Pendidikan	625.733.155.958,59	490.456.158.831,89	135.276.997.126,70	78,38
10 1 19	Kepemudaan dan Olah Raga	19.897.481.367,00	17.707.017.959,44	2.190.463.407,56	88,99
10 1 23	Perpustakaan	9.312.733.317,00	8.498.970.439,00	813.762.878,00	91,26
11	Perlindungan Sosial	72.173.192.804,00	58.305.372.775,90	13.867.820.028,10	80,79
11 1 06	Sosial	35.359.195.397,00	25.703.759.509,40	9.655.435.887,60	72,69
11 1 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.318.658.150,00	1.265.614.670,00	53.043.480,00	95,98
11 1 09	Pangan	11.049.194.950,00	9.215.793.046,50	1.833.401.903,50	83,41
11 1 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.984.344.338,00	14.547.645.169,00	1.436.699.169,00	91,01
11 4 05	Penanggulangan Bencana Daerah	8.461.799.969,00	7.572.560.381,00	889.239.588,00	89,49
Jumlah		2.707.862.663.626,54	2.103.467.535.397,26	604.395.128.229,28	77,68

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

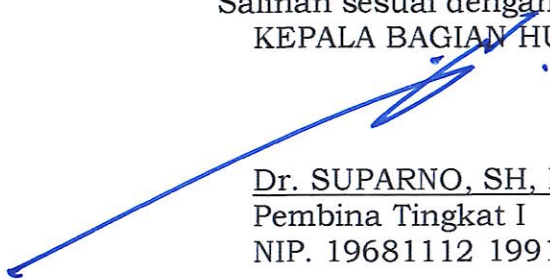
URAIAN	2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	742.764.421.538,17	489.523.033.616,78
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(742.764.421.538,17)	(489.523.033.616,78)
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	567.887.071.245,26	743.167.380.451,53
Sub Total	567.887.071.245,26	743.167.380.451,53
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(163.461.886,43)
Lain-lain	0,00	(239.497.026,93)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	567.887.071.245,26	742.764.421.538,17

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4 = 2-3	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	369.688.858.983,70	470.184.607.665,06	(100.495.748.681,36)	(21,37)
Pendapatan Retribusi Daerah	38.712.721.679,33	46.920.433.833,00	(8.207.712.153,67)	(17,49)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.395.445.543,80	52.675.442.700,39	(18.279.997.156,59)	(34,70)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	67.487.547.051,25	52.345.504.688,34	15.142.042.362,91	28,93
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>510.284.573.258,08</b>	<b>622.125.988.886,79</b>	<b>(111.841.415.628,71)</b>	
<b>PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	58.385.545.911,00	41.907.655.640,00	16.477.890.271,00	39,32
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	61.161.019.917,00	101.633.937.844,00	(40.472.917.927,00)	(39,82)
Dana Alokasi Umum	805.071.632.000,00	886.503.661.000,00	(81.432.029.000,00)	(9,19)
Dana Alokasi Khusus	161.164.220.911,00	185.881.891.526,00	(24.717.670.615,00)	(13,30)
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.085.782.418.739,00</b>	<b>1.215.927.146.010,00</b>	<b>(130.144.727.271,00)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	73.440.909.000,00	73.871.078.000,00	(430.169.000,00)	(0,58)
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>73.440.909.000,00</b>	<b>73.871.078.000,00</b>	<b>(430.169.000,00)</b>	<b>(0,58)</b>

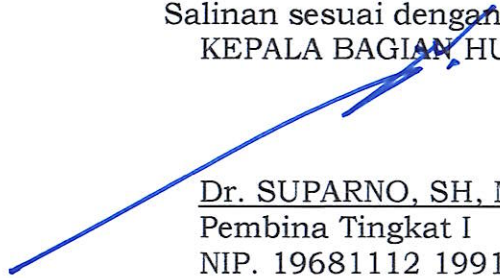
(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4 = 2-3	5
Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi	(18.205.936.478,42)	307.154.566.308,06	(325.360.502.786,48)	(105,93)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>				
Defisit Non Operasional	14.943.235.303,00	228.385.717,00	14.714.849.586,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional	14.943.235.303,00	228.385.717,00	14.714.849.586,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(14.943.235.303,00)	(228.385.717,00)	(14.714.849.586,00)	0,00
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	195.120.718,00	143.521.065,00	51.599.653,00	35,95
Jumlah Beban Luar Biasa	195.120.718,00	143.521.065,00	51.599.653,00	35,95
Pos Luar Biasa	(195.120.718,00)	143.521.065,00	51.599.653,00	35,95
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI</b>	<b>(33.344.292.499,42)</b>	<b>306.782.659.526,06</b>	<b>(340.126.952.025,48)</b>	<b>(110,87)</b>

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

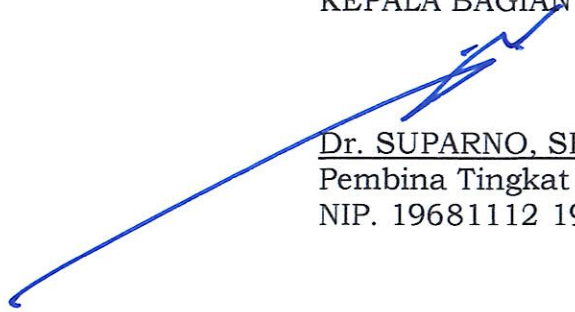
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	6.379.676.358.783,95	6.382.648.910.352,52
SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.344.292.499,42)	306.782.659.526,06
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	139.196.677.544,87	(309.755.211.094,62)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	139.196.677.544,87	(309.755.211.094,62)
EKUITAS AKHIR	6.485.528.743.829,40	6.379.676.358.783,95

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NERACA  
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	552.257.089.862,88	732.518.691.596,23
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara FKTP	-	2.606.583.460,30
Kas di Bendahara Dana BOS	-	3.118.259.712,27
Kas di Bendahara BLUD	10.961.839.481,97	4.526.792.584,14
Kas Lainnya	8.415.546.727,98	
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	251.771.488.237,46	234.109.824.236,26
Piutang Retribusi Daerah	10.315.657.788,88	11.550.653.250,88
Piutang Dana Bagi Hasil	-	12.681.249.689,00
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-
Penyisihan Piutang	(177.509.759.373,67)	(165.290.633.273,42)
Beban Dibayar Dimuka	847.790.750,92	694.628.866,39
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Piutang Pendapatan Lainnya	-	-

(dalam Rupiah)

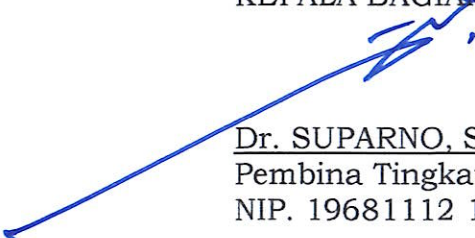
Uraian	2020	2019
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.730.362.809,84	851.525.261,12
Utang Belanja	5.164.778.923,00	9.679.341.348,85
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.067.951.766,75	1.566.027.903,26
Utang Pihak Ketiga Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.963.093.499,59	12.096.894.513,23
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	12.963.093.499,59	12.096.894.513,23
EKUITAS DANA		
EKUITAS		
Ekuitas	6.485.528.743.829,40	6.379.676.358.783,95
JUMLAH EKUITAS	6.485.528.743.829,40	6.379.676.358.783,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.498.491.837.328,99	6.391.773.253.297,18

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN ARUS KAS  
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk :</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	351.759.920.903,49	460.047.450.664,60
Penerimaan Retribusi Daerah	38.449.140.906,00	46.605.703.263,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.348.652.404,80	28.559.431.165,39
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	67.631.529.741,06	52.853.457.258,02
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	59.204.393.562,00	41.088.807.989,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	73.023.421.955,00	89.771.535.806,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	805.071.632.000,00	886.503.661.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	161.164.220.911,00	185.881.891.526,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	73.440.909.000,00	73.871.078.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169.329.629.405,00	252.268.704.314,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Lainnya	32.910.359.000,00	3.458.359.000,00
Penerimaan Hibah	90.756.375.316,00	67.075.400.000,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	-
Penerimaan Lainnya	0,00	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.956.090.185.104,35</b>	<b>2.187.985.479.986,01</b>
<b>Arus Kas Keluar :</b>		
Pembayaran Pegawai	729.276.551.486,77	791.508.273.117,88
Pembayaran Barang dan Jasa	811.880.036.507,74	804.011.044.448,65
Pembayaran Bunga	0,00	-
Pembayaran Subsidi	0,00	-



(dalam Rupiah)

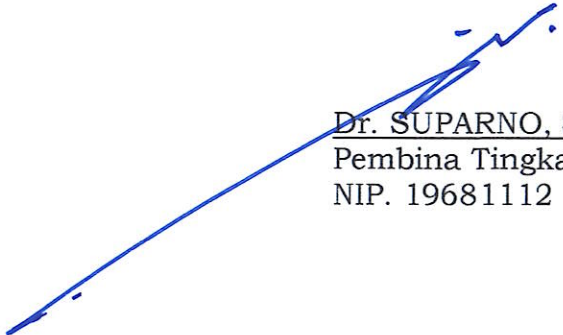
Uraian	2020	2019
Saldo Awal Kas di BUD, Kas Bend. Penerimaan JKN, Kas di Bend. BOS		
Saldo Awal Kas di BUD, Kas JKN, Kas BOSNAS, dan Kas BLUD SILPA	742.764.421.538,17	489.359.571.730,35
Saldo Akhir Kas di BUD	552.257.089.862,88	732.518.691.596,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2020	-	2.602.752.860,30
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2019	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2020	-	3.116.184.497,50
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2019	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2018	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD 2020	10.961.839.481,97	4.526.792.584,14
Saldo Akhir Kas Lainnya	8.415.546.727,98	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN non SILPA	-	3.830.600,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS non SILPA	-	2.075.214,77
Saldo Akhir Kas	571.634.476.072,83	742.770.327.352,94

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BAB I  
PENDAHULUAN

Sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Malang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Malang.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

BAB VII  
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.

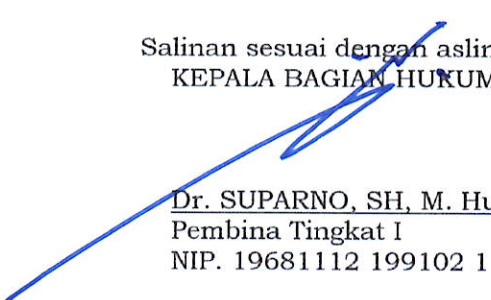
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

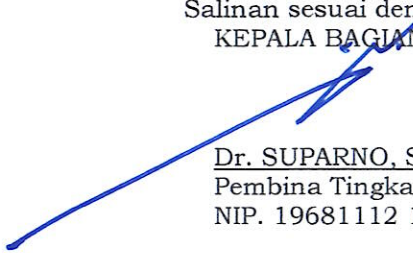
NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN 2020	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
1	2	3	4	5	6
1	PIUTANG PAJAK	234.109.824.236,26	55.816.581.616,27	38.154.917.615,07	251.771.488.237,46
2	PIUTANG RETRIBUSI	11.550.653.250,88	2.731.001.105,00	3.965.996.567,00	10.315.657.788,88
3	PIUTANG DANA BAGI HASIL	12.681.249.689,00	-	12.681.249.689,00	-
4	PIUTANG LAINNYA	4.060.156.713,50	6.753.069.113,88	3.208.488.477,00	7.604.737.350,38
JUMLAH		262.401.883.889,64	65.300.651.835,15	58.010.652.348,07	269.691.883.376,72

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN 2020	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
1	2	3	4	5	6
1	PIUTANG PAJAK	157.722.391.047,46	10.702.245.712,97	-	168.424.636.760,43
2	PIUTANG RETRIBUSI	5.772.275.587,46	772.653.303,22	-	6.544.928.890,68
3	PIUTANG DANA BAGI HASIL	-	-	-	-
4	PIUTANG LAINNYA	1.795.966.638,50	744.227.084,07	-	2.540.193.722,56
JUMLAH		165.290.633.273,42	12.219.126.100,26	-	177.509.759.373,67

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

NO	JENIS DANA BERGULIR	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN 2020	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				
	JUMLAH				

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah (Penyertaan Modal Daerah)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	PDAM	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	584.521.462.484,06	260.913.458.891,00
2	2020	PD. BPR	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	50.000.000.000,00	11.200.000.000,00
3	2020	PD. RUMAH POTONG HEWAN	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	28.881.876.008,00	9.515.076.008,00
4	2020	BANK JATIM	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	27.158.999.750,00	27.158.999.750,00
JUMLAH					690.562.338.242,06	308.787.534.649,00

Keterangan :

Jumlah Penyertaan Modal dalam Lampiran XI merupakan penyertaan modal tunai Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam nilai penyertaan modal dalam Laporan Keuangan BUMD dan jumlahnya tidak sama dengan jumlah ekuitas BUMD yang sudah memperhitungkan penambahan modal dari hibah, dana cadangan, dan saldo laba tahun berjalan.

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

(INVESTASI) DAERAH

Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
25.000.000.000,00	285.913.458.891,00	298.608.003.593,06	28.112.397.253,00	-	285.913.458.891,00
2.500.000.000,00	13.700.000.000,00	36.300.000.000,00	-	-	13.700.000.000,00
-	9.515.076.008,00	19.366.800.000,00	-	-	9.515.076.008,00
-	27.158.999.750,00	-	5.236.255.151,80	-	27.158.999.750,00
27.500.000.000,00	336.287.534.649,00	354.274.803.593,06	33.348.652.404,80	-	336.287.534.649,00

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

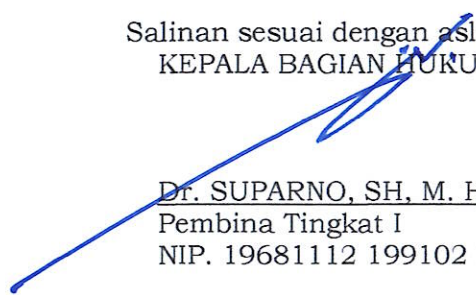
NO	JENIS INVESTASI	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN 2020	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH	-	2.646.600.381.267,00	50.438.820.000,00	14.759.052.000,00	2.682.280.149.267,00
2	PERALATAN DAN MESIN	-	852.192.730.277,51	146.165.543.823,64	24.444.290.182,51	973.913.983.918,64
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	1.293.138.813.847,05	269.919.244.119,23	96.201.552.106,02	1.466.856.505.860,26
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	1.991.556.907.021,28	141.167.419.178,84	69.572.765.867,49	2.063.151.560.332,63
5	ASET TETAP LAINNYA	-	65.588.044.383,01	7.468.042.220,00	4.937.037.234,01	68.119.049.369,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	32.635.869.400,00	118.163.915.500,00	10.394.774.563,48	140.405.010.336,52
JUMLAH			6.881.712.746.195,85	733.322.984.841,71	220.309.471.953,51	7.394.726.259.084,05

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

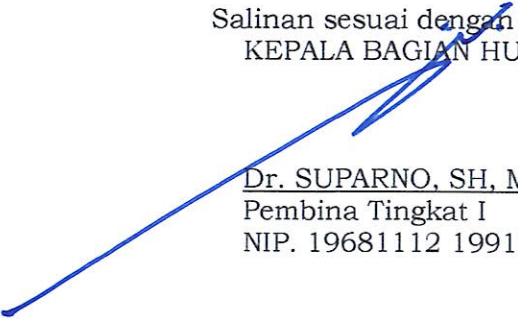
NO	JENIS INVESTASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH ASET TETAP PER 31-12-2020
1	2	3	4
1	TANAH	-	2.682.280.149.267,00
2	PERALATAN DAN MESIN	-	973.913.983.918,64
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	1.466.856.505.860,26
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	2.063.151.560.332,63
5	ASET TETAP LAINNYA	-	68.119.049.369,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	140.405.010.336,52
JUMLAH			7.394.726.259.084,05

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH KONS. DALAM Pengerjaan PER 31-12-2020	SKPD
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Garasi Bis Sekolah Jl. Arumba 06 RT.01 RW.01	2019	81.432.000,00	Dinas Pendidikan
2	Perencanaan Gedung Baru SMP( Kajian Penentuan Lokasi )	2019	31.580.000,00	Dinas Pendidikan
3	Perencanaan Gedung Baru SMP( Kajian Penentuan Lokasi )	2019	31.580.000,00	Dinas Pendidikan
4	Perencanaan Gedung Baru SMP( Kajian Penentuan Lokasi )	2019	31.580.000,00	Dinas Pendidikan
5	pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor anggaran DAK ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sejumlah 11 paket Bangunan	2020	1.772.424.653,00	Dinas Pendidikan
6	Perencanaan /DED pembuatan ruang perawatan penyakit akibat rokok di RSUD	2013	147.110.000,00	Dinas Kesehatan
7	Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor berupa jasa konsultan perencanaan teknis	2020	137.902.000,00	Dinas Kesehatan
8	Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor berupa belanja jasa konsultansi perencanaan rehab sedang berat Gedung 1 (lanjutan lantai 3, penambahan ruang pertemuan, keuangan dan farmasi)	2020	97.824.000,00	RSUD
9	pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor ke Kunstruksi dalam Pengerjaan	2020	90.000.000,00	RSUD
10	Pembangunan Drainase Jl Bondowoso - Kali Metro	2013	24.073.625.000,00	DPUPR
11	Perencanaan Teknis Penyusunan DED Rumah Dinas PMK Kota Malang	2014	49.900.000,00	DPUPR
12	Peningkatan Jembatan Lowokdoro Bumiayu	2014	85.277.000,00	DPUPR
13	Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 01 Kel. Balarjosari	2014	9.072.000,00	DPUPR
14	Pelebaran jalan dan jembatan Jl. RW 14 dan RW 15 Kel. Bunulrejo	2014	15.730.000,00	DPUPR
15	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Minum RW.02 Kelurahan Bandungrejosari Kec. Sukun	2017	44.100.000,00	DPUPR
16	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi / Pengembangan Jalan RT.06 RW.06 Kel. Dinoyo	2017	6.350.000,00	DPUPR
17	Jasa Konsultansi Perencanaan Air Minum RW 01 Sukun	2017	47.600.000,00	DPUPR
18	Jasa Konsultansi Perencanaan Air Minum RW I/II Jl. LA. Adi Sucipto	2017	47.600.000,00	DPUPR
19	Jasa Konsultansi Perencanaan Air Minum RW 15 Kel Purwantoro	2017	47.600.000,00	DPUPR
20	Perencanaan Pembangunan Pedestrian di Kota Malang Pedestrian JL. Letjen Sutoyo Kel. Rampal celaket	2020	88.256.000,00	DPUPR
21	Perencanaan Pembangunan Pedestrian di Kota Malang Pedestrian JL. Langsep kel. Bareng	2020	97.120.000,00	DPUPR
22	Perencanaan Pembangunan Pedestrian di Kota Malang Pedestrian JL. Suropati kel. Klojen	2020	97.031.000,00	DPUPR
23	Perencanaan Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian JL. Bandung Kel. Penanggungan	2020	97.302.000,00	DPUPR
24	Perencanaan Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan Lowokdoro Kel. Bumiayu	2020	89.391.000,00	DPUPR
25	Perencanaan Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan Peler Kel. Samaan	2020	44.107.000,00	DPUPR
26	DED Perenc Rehab/ Pengemb Sal Drain/Gorong-gorong Sepanjang Jl Cengkeh-Kalpataru RW VII ,RW VIII, RW X Kel. Jatimulyo	2020	29.900.000,00	DPUPR
27	Perencanaan Rehab/Pengemb Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Teluk Grajakan RW 02 Kel. Pandanwangikanal permukaan)	2020	7.447.000,00	DPUPR
28	Perencanaan Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW.03 Kel. Polehanpermukaan)	2020	13.453.000,00	DPUPR
29	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong Jl. Musi Kel. Bunulrejo	2020	14.938.000,00	DPUPR

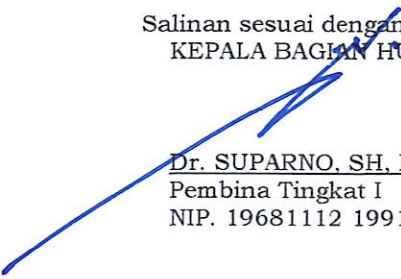
NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH KONS. DALAM PENERJAAN PER 31-12-2020	SKPD
30	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi/ Pengemb. Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jl. Bogor Terusan Kel Penanggungan	2020	20.573.000,00	DPUPR
31	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan Penerangan Jalan Kecamatan Blimbing, Jembatan Muharto Barat, Jembatan Muharto Timur, Jembatan Kahuripan	2020	379.301.000,00	DPUPR
32	Pembangunan Gedung Islamic Center yang belum selesai 100%	2020	55.139.077.600,00	DPUPR
33	Reklas Aset lain-lain ke KDP berupa DED perolehan tahun 2015 islamic center yang digunakan lagi dalam pembangunan islamic center 2020	2020	115.180.883,52	DPUPR
34	Pengadaan konstruksi Jembatan ponton( Jembatan Kedungkandang )	2020	56.601.655.700,00	DPUPR
35	Jasa Perencanaan Pembangunan Unit Pilah Kompos Daur Ulang Kelurahan Bandungrejosari	2018	27.885.000,00	DLH
36	Jasa Perencanaan Pembangunan Teknis Perbaikan Rumah PKD Kelurahan Balarjosari	2018	15.450.000,00	DLH
37	Jasa Perencanaan Lanjutan Pembangunan Unit PKD Kelurahan Tlogowaru	2018	28.215.000,00	DLH
38	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan RTH Merjosari Pembuatan IPAL, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2020	54.246.500,00	DLH
39	Jasa Konsultasi Perencanaan Jaringan Sumur Penyiraman Dan Kolam Air Mancur, dll	2020	29.326.000,00	DLH
40	Pengadaan Ruang Atas Bangunan Stadion Gajayana Untuk Tempat Kerja	2019	27.000.000,00	Dispora
41	DED/Perencanaan pembangunan gedung perkantoran BPKAD Kota Malang	2016	367.928.000,00	BPKAD
42	Pengadaan Ruang Atas Jl. Arumba 06 RT.01 RW.01 Tunggulwulung	2019	37.500.000,00	Kelurahan Tunggulwulung
43	Reklas Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor berupa bangunan multi year masuk dalam KDP	2020	45.000.000,00	Kelurahan Tunggulwulung
44	Jasa konsultansi perencanaan Gedung dan bangunan masuk dalam Kontruksi dalam Pengerjaan sesuai Permendagri 108 tahun 2016	2020	19.800.000,00	Bapenda
45	Jasa konsultansi perencanaan penyusunan DED rehabilitasi sedang/berat gedung Area Balaikota	2020	20.140.000,00	Bag. Umum
46	Jasa Konsultasi DED Pasar Burung kegiatan Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat	2020	49.500.000,00	DINKOP
	JUMLAH		140.405.010.336,52	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
					2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	-	-	-	-	-
2	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	-	50.105.000,00	87.590.000,00	72.405.000,00	65.290.000,00
3	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	106.449.318.000,00	-	7.607.000.000,00	98.842.318.000,00
4	ASET TAK BERWUJUD	-	40.245.432.712,00	5.418.600.700,00	221.498.560,00	45.442.534.852,00
5	ASET LAIN YANG DIBATASI PENGUNAANNYA	-	483.999.255,50	25.113.183,68	-	509.112.439,18
6	ASET LAIN LAIN	-	72.994.557.200,52	7.811.218.048,00	10.988.404.092,92	69.817.371.155,60
JUMLAH			220.223.412.168,02	13.342.521.931,68	18.889.307.652,92	214.676.626.446,78

Keterangan:

1. Aset Tak Berwujud disajikan berbeda dengan neraca sebesar Rp8.205.648.058,75 karena di neraca disajikan sebesar nilai buku yaitu sesudah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp37.236.886.793,25
2. Aset Lain-lain disajikan berbeda dengan neraca sebesar Rp32.155.189.589,17 karena di neraca disajikan sebesar nilai buku yaitu sesudah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp37.662.181.566,43.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

NO	MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN	TAHUN MULAI MENGADAKAN CADANGAN DAERAH	SALDO AWAL DANA CADANGAN TAHUN 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR CADANGAN TAHUN 2020	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		N I H I L						
JUMLAH								

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

NO	URAIAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN 2020	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
1	2	3	4	5	6
1	Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yg disetor ke kas bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah	510.263,00	-	-	510.263,00
2	Kas Bendahara Jaminan Bongkar	483.999.255,50	25.113.183,68	-	509.112.439,18
3	Hutang klaim jaminan kesehatan ke RSUD pada Dinas Kesehatan	55.955.400,00	-	55.955.400,00	-
4	Hutang Jangka Pendek klaim Jaminan Kesehatan kepada RSSA, RST, RSI Aisiyah, RS Lavalette, RSUB Malang pada Dinas Kesehatan	1.025.562.984,76	-	1.025.562.984,76	-
5	Hutang Jangka Pendek atas sisa pelaksanaan kegiatan pemberian hibah pariwisata kepada pelaku pariwisata kepada RKUN	-	5.558.329.064,57	-	5.558.329.064,57
JUMLAH		1.566.027.903,26	5.583.442.248,25	1.081.518.384,76	6.067.951.766,75

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

NO	URAIAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2020	PENAMBAHAN 2020	PENGURANGAN 2020	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2020
1	2	3	4	5	6
		NI	HI	LI	
	JUMLAH				

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002



LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D AKHIR TAHUN n	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN n-2	REALISASI TAHUN n-1	REALISASI TAHUN n		
1	2	3	4	5	6	7	8
			N	I	H	I	L
JUMLAH			-	-	-	-	-

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XX  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH /  
 PERUSAHAAN DAERAH

I. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2020

Aset		
Aset Lancar	Rp 174.386.540.199,00	
Aset Tidak Lancar	Rp 214.076.989.344,00	
Aset Dalam Pelaksanaan	Rp -	
TOTAL Aset		<u>Rp 388.463.529.543,00</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 27.368.160.294,00	
Kewajiban Jangka Panjang	Rp 27.246.029.705,00	
Ekuitas (Modal)	Rp 333.849.339.544,00	
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 388.463.529.543,00

LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI TAHUN 2020

PENDAPATAN USAHA		Rp201.607.256.622,00
BEBAN USAHA		<u>-Rp151.199.260.996,00</u>
LABA USAHA		Rp50.407.995.626,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN/BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Lain-lain	Rp3.149.439.949,00	
Beban Lain-lain	<u>-Rp3.044.454.747,00</u>	
Jumlah Pendapatan Lain-lain/Beban Non Operasional		<u>Rp104.985.202,00</u>
LABA USAHA SEBELUM PAJAK		Rp50.512.980.828,00
Pajak Penghasilan		-Rp11.591.419.170,00
Cadangan Dana Tujuan		<u>Rp0,00</u>
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		<u><u>Rp38.921.561.658,00</u></u>

IV. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.

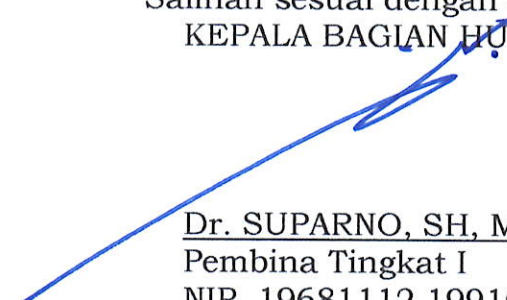
Posisi saham Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2020 adalah 108.635.999 lembar dengan jumlah nominal sebesar Rp27.158.999.750,00.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002